

# JURNAL KOMUNIKASI

---

---

Volume 1, Nomor 2, April 2007

ISSN 1907-848X

Halaman 97 - 188

---

---

## DAFTAR ISI

### Editorial

**Pers dan Teknologi Media:  
Dejurnalisasi di Tengah Konvergensi**  
*Didik Supriyanto - Iwan Awaluddin Yusuf*  
( 97 - 109 )

**Citizen Journalism:  
Ketika Berita Tidak Hanya Memiliki Satu Muka**  
*Zaki Habibi*  
( 110 - 120 )

**Aplikasi Nilai-nilai Jurnalisme Warga pada Radio Komunitas**  
*A. Darmanto*  
( 121 - 132 )

**Kegagalan Jurnalisme Profesional  
dan Kemunculan Jurnalisme Publik**  
*Puji Rianto*  
( 133 - 145 )

**Jurnalisme Publik pada Media Penyiaran Publik**  
*Masduki - Bambang Muryanto*  
( 147 - 154 )

**Praktik "Jurnalisme Syariah" di Radio MQ FM Yogyakarta**  
*Abdul Rohman*  
( 155 - 162 )

**Jurnalisme Bencana: Sebuah Tinjauan Etis**  
*Muzayin Nazaruddin*  
( 163 - 177 )

**Mewaspada! Praktik Jurnalisme yang Memproduksi Keburukan**  
*Ana Nadhya Abrar*  
( 179 - 188 )

# Jurnalisme Bencana: Sebuah Tinjauan Etis

Muzayin Nazaruddin <sup>1</sup>

## **Abstract**

*Disaster journalism is how a mass media reports about disasters. As a new genre of journalism, disaster journalism hasn't been studied more by academicians. Whereas, this new genre of journalism is very important, because Indonesia is susceptible country of disasters, mass media always reports about disasters enthusiastically, society entrust the information of disasters from mass media, and unclear information always happen in every disaster. In the fact, many weakness of disasters journalism in Indonesia, those are: mass media enthusiasm as a collector and distributor of disaster aids, more than their role to inform disasters clearly and completely, inconsistent news report, dramatisation tendency in journalism report, and no role of early warning system of disasters in mass media. Start from these critics, this article proposes some principles in disaster journalism, such as: accuracy, humanism, commitment to rehabilitation, and control and advocacy. Besides that, this article suggests some agendas: comprehensive research about disaster journalism, code ethic of disaster journalism building, and disaster journalism training for Indonesian journalists.*

## **Key words:**

*Disaster, disaster journalism, dramatisation, caritative social role, early warning system, accuracy, rehabilitation.*

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negeri rentan bencana. Belum hilang trauma dan kepedihan akibat tsunami di Aceh dan Sumatera Utara pada penghujung 2004, bencana demi bencana terus melanda berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari tanah longsor, banjir, gempa bumi, hingga kebakaran hutan. Hanya berselang satu setengah tahun, bencana alam dalam skala besar kembali mengguncang negeri ini, tepatnya pada 27 Mei 2006, Yogyakarta dan beberapa wilayah di Jawa Tengah diguncang gempa tektonik 5,9 Skala Richter. Ribuan korban meninggal, puluhan ribu bangunan runtuh, mulai dari rumah pribadi hingga infrastruktur publik. Tak berapa lama, masyarakat Yogyakarta kembali diguncang bencana erupsi Gunung Merapi pada pertengahan 2006. Pada saat hampir bersamaan, PT. Lapindo Brantas melakukan 'malpraktik', menyebabkan kebocoran pada pipa pengeboran gas mereka. Kebocoran pipa tersebut mengeluarkan lumpur panas yang hingga sekarang belum bisa dihentikan dan telah menenggelamkan beberapa desa di Porong, Sidoarjo. Terakhir, banjir besar melanda Jakarta selama satu pekan lebih sejak 2 Februari 2007.

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia

Masyarakat luas mengetahui berbagai bencana tersebut melalui media massa. Bahkan, terdapat ketergantungan publik terhadap media massa dalam mengakses informasi tentang bencana yang tengah terjadi. Pada saat itulah—seiring rentetan bencana yang terjadi—muncul genre baru dalam jurnalistik, yang kemudian (dalam tulisan ini) disebut jurnalisme bencana, yang bisa diartikan sebagai cara media memberitakan bencana.

Dengan standar artikel di jurnal ilmiah, tema jurnalisme bencana ini belum banyak dikaji, khususnya dalam konteks Indonesia. Dari penelusuran penulis, hanya terdapat dua buah artikel di jurnal ilmiah nasional yang membahas peran media dalam bencana. Artikel pertama ditulis oleh Iwan Awaluddin Yusuf, berjudul “*Ada Kuis di Tengah Gempa: Membangun Epistemologi Liputan Bencana di Media*” (*Jurnal Komunikasi*, 2006: 41-51). Artikel kedua ditulis oleh Masduki, berjudul “*Wajah Ganda Media Massa dalam Advokasi Bencana Alam*” (*Jurnal UNISIA*, 2007). Paska-tsunami Aceh dan gempa Yogya, bahasan jurnalisme bencana lebih banyak dijumpai di koran-koran harian, berbentuk artikel populer yang ditulis oleh para penulis dari berbagai disiplin ilmu.

Di level internasional, jumlah artikel ilmiah tentang bencana dan penanggulangannya sudah cukup banyak, namun yang berangkat dari perspektif media—terlebih jurnalistik—masih sedikit. Penulis menemukan beberapa artikel tentang bencana yang berangkat dari perspektif media, dua diantaranya adalah “*Television News and Audiences Understanding of War, Conflict and Disaster*” ditulis oleh Greg Philo (*Journalism Studies*, 2002: 173-186) dan “*Watts, the 1965 Los Angeles Riots, and the Communicative Construction of the Fear Epicenter of Los Angeles*”, oleh Sorin Adam Matei dan Sandra Ball-Rokeach (*Communication Monographs*, 2005: 301-323).

Dengan argumentasi akademis itulah, penulis menyusun artikel ilmiah tentang jurnalisme bencana ini dengan pendekatan etis. Artinya, jurnalisme bencana menjadi sebuah objek permasalahan yang diteropong melalui filsafat etika. Artikel ini berupaya membuat analisis etis-kritis atas praktik jurnalisme bencana yang dilakukan media-media di Indonesia, untuk pada akhirnya mengajukan etis-normatif bagi jurnalisme bencana tersebut.

Jurnalisme bencana dalam artikel ini dimaksudkan sebagai bagaimana media memberitakan bencana (Masduki, *Jurnal UNISIA*, 2007; Amirudin, *Suara Merdeka*, 26 April 2006; Hermawan, *Bernas Jogja*, 22 Februari 2007; Sulyana Dadan, *Kompas*, 30 September 2006). Dalam kata ‘*bagaimana memberitakan*’ terkandung dua dimensi: proses dan hasil. Dimensi proses mengacu pada proses produksi berita-berita bencana, dimensi hasil mengacu pada berita-berita bencana yang dimuat atau disiarkan media (Eriyanto, 2001: 32-33; Masduki, 2003: 48). Dalam pengertian dasar itu, kita bisa membagi dua distingsi, antara *das sein* dan *das sollen*, antara realitas jurnalisme bencana dan idealitas jurnalisme bencana.

Dengan pertimbangan tersebut, artikel ini terbagi menjadi dua bagian utama. *Pertama*, kritik jurnalisme bencana. Dalam bagian ini penulis mengkaji secara kritis

realitas praktik jurnalistik dalam berbagai bencana dilaksanakan oleh media-media di Indonesia. *Kedua*, normatif jurnalisme bencana. Berangkat dari kritik yang diajukan, penulis mengajukan beberapa landasan normatif etis tentang bagaimana seharusnya praktik-praktik jurnalistik dalam bencana dilakukan oleh media-media di Indonesia. Sebagai penutup, penulis mengajukan beberapa agenda dalam rangka menuju etika normatif jurnalisme bencana tersebut.

### **Urgensi Jurnalisme Bencana**

Terdapat beberapa landasan epistemologis bahwa jurnalisme bencana adalah genre baru jurnalistik yang sangat penting bagi media-media di Indonesia. *Pertama*, secara geologis maupun sosiologis Indonesia adalah negeri rentan bencana. *Kedua*, media massa selalu (dan pasti) akan memberitakan setiap peristiwa bencana yang terjadi, bahkan menjadi *headline* ataupun mengisi waktu-waktu *prime time*. *Ketiga*, masyarakat menggantungkan pengetahuannya tentang bencana kepada informasi yang disajikan media massa. *Keempat*, bencana selalu diikuti ketidakpastian dan kesimpangsiuran informasi, yang seringkali menyesatkan, karena itu media massa menjadi tumpuan utama untuk menyajikan informasi yang akurat.

*Argumentasi pertama*, Indonesia adalah negeri rentan bencana, baik karena kondisi alamnya maupun perilaku masyarakatnya. Kepulauan Indonesia termasuk dalam wilayah *Pacific Ring of Fire* (Deretan Gunung Berapi Pasifik), yang bentuknya melengkung dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi Utara. Selain itu, Indonesia juga terletak di pertemuan dua lempeng tektonik dunia dan dipengaruhi oleh tiga gerakan, yaitu Gerakan Sistem Sunda di bagian barat, Gerakan Sistem Pinggiran Asia Timur dan Gerakan Sirkum Australia ([www.walhi.or.id/kampanye/bencana](http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana)). Jelas, kedua faktor tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap letusan gunung berapi dan gempa bumi. Kondisi alam ini diperparah perilaku masyarakat yang rakus mengeksploitasi sumber daya alam, tanpa memperhatikan aspek-aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan.

Dua penyebab utama tersebut memunculkan dua jenis bencana yang mengancam masyarakat Indonesia: bencana alam dan bencana antropogen (Nurcahyo, [www.mediacenter.or.id](http://www.mediacenter.or.id); [www.walhi.or.id/kampanye/bencana](http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana)). Sebuah bencana dikatakan sebagai bencana alam jika faktor penyebabnya 'alam', tidak ada faktor keterlibatan manusia. Contohnya adalah tsunami, letusan gunung berapi, dan gempa bumi. Sebaliknya, jika melibatkan manusia sebagai penyebab, bencana tersebut dinamakan bencana antropogen. Contohnya adalah banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan kekeringan.

Kerentanan tinggi masyarakat Indonesia terhadap bencana tersebut bisa kita lihat dari frekuensi dan jenis-jenis bencana yang melanda dalam setiap tahunnya.

**Tabel 1**  
**Bencana Alam di Indonesia (1998-2003)**

Jenis	Jumlah kejadian	Korban Jiwa	Kerugian (juta rupiah)
Banjir	302	1.066	191.312
Longsor	245	645	13.928
Gempa Bumi	38	306	100
Gunung Berapi	16	2	n.a.
Angin Topan	46	3	4.015
<b>Jumlah</b>	<b>647</b>	<b>2.022</b>	

Sumber: Bakornas PB (diambil dari [www.walhi.or.id/kampanye/bencana](http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana))

Jika kita menyimak perkembangan di tahun-tahun selanjutnya, kita benar-benar tidak akan bisa menganggap remeh potensi bencana di negeri kepulauan ini. Penghujung tahun 2004, Aceh dan Sumatera Utara dihempas gempa bumi dan tsunami. Lebih dari 200 ribu jiwa menjadi korban, jumlah pengungsi mencapai sekitar 500.000 orang, lebih dari 70% infrastruktur fisik mengalami kerusakan cukup parah, termasuk infrastruktur pemerintahan, sosial dan pendidikan. Belum lagi jika kita menghitung dampak psikologis, sosial, kultural, dan pendidikan dari bencana ini. Inilah bencana terbesar yang pernah melanda negeri ini.

Setelah tsunami kita bisa membuat daftar panjang bencana di negeri ini: tanah longsor di berbagai daerah, kebakaran hutan yang kronis di Kalimantan, gempa bumi 5,9 Skala Richter pada 27 Mei 2006, Yogyakarta dan beberapa wilayah di Jawa Tengah, erupsi Gunung Merapi pada pertengahan 2006, lumpur panas Lapindo di Sidoarjo yang belum terselesaikan hingga sekarang, tsunami di Pangandaran, banjir bandang di Sumatera Utara dan Aceh, gempa di Solok, banjir besar Jakarta awal 2007, dan lainnya. Daftar tersebut masih bisa diperpanjang dengan rentetan bencana transportasi, baik pesawat udara, kapal laut, maupun kereta api, yang juga tak kalah banyaknya.

*Argumentasi kedua*, bencana merupakan menu utama bagi media massa. Dalam kacamata bisnis media, bencana adalah *'blessing in disguise'*, menjadi sumber informasi yang tidak pernah kering dengan kandungan nilai berita yang tinggi. Setidaknya ada dua hal utama mengapa media begitu antusias memberitakan bencana (Putra, 2006). *Pertama*, bencana biasanya menciptakan situasi yang tidak pasti (*uncertainty*). Dalam situasi seperti ini, warga masyarakat akan memuncak rasa ingin tahunya. Mereka akan bertanya tentang apa yang terjadi. *Kedua*, bencana bagi media merupakan sebuah even besar yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Sebagai sebuah even besar, bencana mengandung daya tarik luar biasa, tanpa harus direkayasa.

*Argumentasi ketiga*, masyarakat Indonesia—juga dunia—mengetahui berbagai peristiwa bencana melalui media massa. Bagi masyarakat Indonesia, baik masyarakat korban bencana atau bukan, bencana merupakan peristiwa historis yang sangat membekas, secara psikologis dan sosial. Bagi masyarakat korban gempa, bekas psikologis ini sangat mendalam dan permanen, berupa trauma-trauma tertentu. Bagi masyarakat yang bukan korban gempa, bekas psikologis ini berupa empati, kepedulian, juga rasa takut.

Sebagai peristiwa historis yang sangat membekas, masyarakat selalu ingin tahu dan butuh informasi tentang berbagai hal mengenai bencana yang terjadi, penyebab, korban, kerugian, dampaknya secara luas, penanggulangan, dan lainnya. Dalam situasi ketidakpastian yang ditimbulkan bencana, kebutuhan masyarakat akan berita-berita bencana akan meningkat tajam. Masyarakat memuaskan rasa ingin tahunya dengan mengkonsumsi berbagai media yang ada (Rahayu, *Polysemia*, Juli 2006). Dalam kondisi ini, informasi tentang bencana yang disampaikan media massa akan menjadi *the first, the most important*, bahkan kadang *the only one information* yang akan membentuk pengetahuan masyarakat tentang bencana.

*Argumentasi keempat*, bencana selalu diikuti ketidakjelasan, mulai dari bencana apa yang sebenarnya terjadi, sumber dan wilayah bencana, jumlah korban, dan sebagainya. Ketidakjelasan itu kemudian memunculkan berbagai isu atau rumor, yang seringkali justru menyesatkan. Pada 27 Mei 2006, saat terjadi gempa di Yogyakarta, berkembang isu tsunami hingga membuat warga panik dan berduyun-duyun menuju wilayah yang agak tinggi seperti di daerah Kaliurang. Dalam kondisi ini, media massa menjadi tumpuan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi.

### **Titik Berangkat Kajian Jurnalisme Bencana**

Dengan penyederhanaan tertentu, untuk mengamati perkembangan peran media dalam bencana—khususnya jurnalisme bencana—di negeri ini, kita bisa berangkat dari dua momentum, yaitu bencana tsunami di Aceh pada penghujung 2004 dan bencana gempa bumi 27 Mei 2006 di Yogyakarta dan sekitarnya.

Liputan intensif, interaktif, dan langsung tentang bencana tsunami di Aceh pada penghujung 2004, sejak beberapa hari setelah tsunami hingga lebih kurang enam bulan setelah itu, menjadi sebuah momentum di mana media benar-benar menampakkan kekuatan agenda settingnya, sekaligus mempraktikkan sebuah hal baru: jurnalisme bencana. Hampir seluruh media, baik nasional maupun internasional berlomba-lomba memberitakan bencana tsunami di Aceh dan Sumatra Utara secara langsung dan eksklusif. Saat itu, hampir seluruh lapisan masyarakat mengikuti perkembangan pascabencana tsunami dari hari ke hari melalui berbagai media yang ada, terutama televisi. Salah satu hasil nyata dari pemberitaan gencar tersebut adalah tumbuhnya empati dan kepedulian masyarakat secara global, berwujud bantuan—dari dalam dan luar negeri—yang mengalir deras ke Aceh dan Sumatra Utara.

Dalam pemberitaan tsunami, jurnalisme bencana adalah hal baru bagi para jurnalis di negeri ini. Saat itu, kritik utama yang terhadap praktik jurnalisme bencana yang dilakukan media-media di Indonesia adalah melulu berkutat pada dramatisasi berita. Yang muncul dalam pemberitaan adalah isak tangis, kesedihan, nestapa, dan kisah-kisah tragis lainnya. Pemberitaan tersebut ibarat tsunami kedua di Aceh, menyeret masyarakat Aceh menjadi pengemis di kampung sendiri, selera rendah para pemberi bantuan hanya atas dasar rasa kasihan. *Aceh Recovery Forum* (2005) memberikan beberapa kritik terhadap para jurnalis yang meliput bencana tsunami, antara lain

buruknya akurasi informasi, minimnya paradigma jurnalisme perdamaian, dan pemberitaan yang tidak peka terhadap gender dan kelompok marjinal.

Momentum kedua untuk mengamati perkembangan jurnalisme bencana di Indonesia adalah pemberitaan gempa bumi 27 Mei 2006 di Yogyakarta dan beberapa wilayah sekitarnya. Mirip dengan bencana tsunami sebelumnya, hampir seluruh media nasional—televisi, radio, media cetak dan media *online*—berlomba-lomba menyajikan perkembangan pascabencana gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya secara langsung dan interaktif. Berbagai bantuan mengalir deras ke Yogyakarta, salah satunya karena pemberitaan gencar tersebut. Ternyata, dalam momentum kedua ini, pihak media kembali melakukan kesalahan serupa, jurnalisme bencana tetap saja berkuat pada dramatisasi berita.

### **Praktik Jurnalisme Bencana: Beberapa Kritik Etis**

Dalam setiap bencana, media memegang kuasa sangat besar karena masyarakat menggantungkan sumber informasi tentang bencana dari media. Tentunya, kuasa besar ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh media untuk melakukan edukasi bencana kepada publik.

Sayang, potensi kuasa yang besar tersebut kurang dimanfaatkan oleh media di Indonesia. Media-media di Indonesia menunjukkan euforia saat memberitakan bencana. Sebagian besar media hanya mengeksploitasi bencana sebagai '*kisah satir yang menghibur*', demi kepentingan akumulasi modal semata. Dalam kacamata bisnis media, bencana adalah '*bad news but good news*', sumber informasi yang tidak pernah kering dengan kandungan nilai berita tinggi.

Hingga saat ini, belum ada kajian yang lengkap dan sistematis tentang praktik jurnalisme bencana di Indonesia. Maka, sebagai sebuah tulisan pengantar, penulis mengajukan beberapa kritik utama terhadap praktik jurnalisme bencana oleh media-media Indonesia.

Kritik mendasar atas praktik jurnalisme bencana di Indonesia adalah peran ganda media dalam bencana—yang seringkali kontradiktif—yaitu peran jurnalistik sebagai penyebar informasi dan peran sosial karitatif sebagai lembaga pengumpul dan penyalur bantuan bencana (Masduki, *Jurnal UNISIA*, 2007) Ternyata, media lebih antusias berperan sebagai lembaga pengumpul dan penyalur bantuan bencana daripada berkonsentrasi pada peran jurnalistiknya dalam bencana. Seolah-olah media yang paling berjasa adalah media yang berhasil mengumpulkan nominal sumbangan tertinggi.

Antusiasme media menjadi lembaga penyalur bantuan ini tampak begitu jelas dalam penanganan bencana Tsunami Aceh, penghujung 2004 lalu. Hampir seluruh media mempunyai program kemanusiaan dengan namanya masing-masing yang jauh lebih dikenal publik dibandingkan pemberitaan-pemberitaan bencana yang dilakukan. Sebut saja "Metro TV— Indonesia Menangis", "RCTI Peduli", "Pundi Amal SCTV", "Dompot Kemanusiaan Kompas", dan lainnya. Euforia pengumpulan dan penyaluran bencana ini kembali terulang dalam penanganan gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Mei 2006 kemarin. Tidak hanya media lokal Yogyakarta atau Jawa Tengah, media-media

nasional berlomba-lomba mendirikan berbagai posko bantuan di berbagai wilayah gempa, tentunya dengan logo atau label perusahaan terpampang besar di setiap posko atau bantuan yang diberikan.

Lembaga sosial karitatif buatan media ini—entah berbentuk yayasan permanen dan khusus atau hanya tim kerja insidental—mempunyai posisi yang kuat. *Pertama*, pemberitaan bencana yang dilakukan mampu menularkan solidaritas sosial secara luas dari masyarakat, yang pada akhirnya tergerak untuk memberikan berbagai macam bantuan. *Kedua*, kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada media untuk menyalurkan bantuan karena jaringan distribusi media yang sudah kuat.

Peran sosial karitatif ini kontradiktif dan menghambat fungsi jurnalistik media sebagai *watchdog* atau lembaga kontrol dalam penyaluran berbagai bantuan bencana. Logikanya, bagaimana mungkin media melakukan kontrol atas penyaluran bantuan bencana jika media itu sendiri terlibat sebagai lembaga penyalur bencana. Posisi media sebagai penyalur bantuan bencana sebenarnya adalah posisi yang krusial, dalam arti riskan bagi kredibilitas sosial media tersebut. *Pertama*, masyarakat yang tertimpa bencana—yang pasti akan kritis terhadap "manajemen" penyaluran bencana—akan mempertanyakan bagaimana mekanisme dan transparansi penyaluran bantuan bencana yang dilakukan media. Contoh nyatanya adalah pertanggungjawaban publik Metro TV grup dalam program Indonesia Menangis di Aceh dan Sumatera Utara yang tak kunjung transparan, walau sudah diaudit oleh auditor Ernest & Young. *Kedua*, kampanye pemberitaan yang terus-menerus yang dilakukan media tentang bantuan yang disalurkan justru akan membuat publik curiga, "membantu atau semata hanya meningkatkan *corporate image*?" Kolom "Serangan Fajar" yang dimuat setiap hari selama beberapa bulan paska-gempa Yogyakarta di halaman pertama sebuah media lokal, menampilkan foto para pimpinan media tersebut yang tengah memberikan bantuan, justru menimbulkan pertanyaan besar dan tidak simpati dari para pengamat media dan publik secara luas. *Ketiga*, pemilihan lokasi tertentu dalam menyalurkan bencana—hal ini adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari—akan menimbulkan 'kecemburuan sosial' yang berujung pada keraguan atas independensi media yang bersangkutan.

Kritik kedua, ambivalensi fungsi media—terutama televisi—dalam bencana, menjalankan liputan dukacita bencana, dalam saat bersamaan juga menjalankan fungsi sukacita yang menunjukkan ketiadaan empati (Yusuf, *Jurnal Komunikasi*, 2006: 44-47). Kita masih ingat betul bagaimana hampir semua stasiun televisi tetap menyiarkan gebyar pesta tahun baru 2005 pada saat bencana tsunami di Aceh dan Sumatra Utara baru saja menyentak dan meminta ratusan ribu korban. Kita juga masih ingat bagaimana televisi terus saja membombardir khalayak dengan gegap gempita Piala Dunia 2006, sementara korban gempa Yogyakarta masih hidup darurat di tenda-tenda pengungsian.

Kritik ketiga menyangkut konsistensi pemberitaan, yaitu tidak adanya kesinambungan dalam pemberitaan bencana, yang ada adalah berita yang terpenggal-penggal, tidak tuntas, tidak mendalam dan absurd. Berita-berita bencana tersebut tidak memiliki visi dan orientasi menuju rehabilitasi. Terkait dengan kritik pertama tersebut,

Hermawan (*Bernas Jogja*, 22 Februari 2007) mengatakan bahwa media ibarat kutu loncat yang melompat dari satu isu ke isu lainnya. Hasilnya, pemberitaan bencana tidak pernah tuntas karena terdesak oleh berbagai isu lain yang tidak kalah seksi, mudah diburu, dan tidak memerlukan mekanisme serius untuk menampilkannya di media.

Kritik atas kecenderungan media menjadi kutu loncat tersebut tidak hanya berlaku untuk praktik jurnalisme bencana di Indonesia. Joe Hight, Managing Editor The Oklahoman dan Cait McMahon, Direktur Australia untuk The Dart Centre for Journalism and Trauma, menandakan kondisi serupa dalam kecenderungan jurnalistik bencana secara global. Dalam bahasa mereka (Hight dan McMahon, 2006, [www.dartcenter.org](http://www.dartcenter.org)), "*Setelah dua hingga empat minggu, tergantung dari dimensi apa yang terjadi, iring-iringan mulai bergerak. Media menemukan headline-headline baru. Orang dibiarkan menjalani kehidupan mereka sendiri.*"

Dalam sebuah penelitiannya yang membahas hubungan antara berita televisi dengan respon audiens dalam pemberitaan tentang perang, konflik dan bencana, Greg Philo (*Journalist Studies*, 2002, 173-186) mengatakan bahwa terdapat kecenderungan televisi untuk memberitakan perang, konflik dan bencana secara parsial, tidak lengkap, yang berakibat pada minimnya pemahaman audiens tentang kejadian-kejadian yang diberitakan. Dalam kesimpulan Philo (*Journalist Studies*, 2002, 173), "*That audiences are misinformed because of the low level of explanation and context that is given and because some explanations that are present in television reporting are partial and informed by what might be termed "neo-colonial" beliefs.*"

Keempat, dalam hal tema pemberitaan bencana, media berkuat pada pemberitaan traumatik dan dramatik, berisi cerita isak tangis, ekspresi sedih, ataupun nestapa korban, dengan dalih menumbuhkan solidaritas (Masduki, *Jurnal UNISIA*, 2007; Yusuf, *Jurnal Komunikasi*, 2006: 45-46). Aroma dramatisasi ini sangat dipengaruhi kebiasaan media dalam meliput peristiwa-peristiwa kriminal. Hasilnya berupa liputan yang mengkriminalkan korban bencana, penuh darah, mayat, jeritan, dan berbagai simbol kekerasan.

Contoh yang sangat gamblang adalah pemberitaan Tsunami Aceh yang selama satu bulan lebih isu utamanya tidak bergeser dari kisah duka para korban. Dalam pemberitaan erupsi Gunung Merapi, pengambilan gambar jarak dekat erupsi menampilkan kengerian yang melebihi realitas sesungguhnya di lokasi kejadian. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi yang semula tenang justru menjadi resah karena terprovokasi masyarakat di daerah lain yang panik menyaksikan tayangan televisi atau berita surat kabar yang mencitrakan betapa bahayanya Gunung Merapi. Begitu pula, dalam pemberitaan gempa Yogyakarta, *headline-headline* 'bombastis' media massa menimbulkan kesan bahwa seluruh Yogyakarta luluh lantak, seakan kehancuran akibat gempa menimpa seluruh wilayah Yogyakarta.

Kecenderungan 'eksploitasi nestapa bencana' ini diperparah oleh minimnya akurasi dalam pemberitaan bencana. Penulis masih ingat betul bagaimana pada tanggal 26 Mei 2006, beberapa jam setelah gempa menimpa Yogyakarta, sebuah radio swasta turut menyiarkan bahwa air bah tsunami telah mencapai kawasan Bantul. Bisa

dimengerti karena saat itu memang isu tsunami merebak di tengah simpang siurnya informasi, namun tentu tidak bisa dimengerti jika isu tsunami ini diterima begitu saja lalu disiarkan kepada masyarakat, tanpa ada cek dan ricek, ataupun menunggu informasi dari sumber yang relevan. Dalam fase pemberitaan gempa Yogyakarta, selanjutnya, media kerap menyebarkan isu gempa susulan atau bencana lebih besar, tanpa melibatkan narasumber yang relevan. Dalam posisi ini, media justru menjadi bencana susulan dan pembawa teror informasi karena berita yang disajikan tidak akurat dan menimbulkan keresahan masyarakat (Yusuf, Jurnal Komunikasi, 2006: 45).

Gejala dramatisasi tersebut ternyata juga bukan monopoli media-media di Indonesia, namun merupakan gejala global dalam dunia jurnalistik. Hight dan McMahan (2006, [www.dartcenter.org](http://www.dartcenter.org)) mengatakan bahwa dalam fase-fase awal pascabencana seringkali ada kabar angin yang sangat dramatis, misalnya angka kematian yang dibesar-besarkan, ketakutan dan kekacauan sosial.

Bukti yang lebih meyakinkan tentang kecenderungan dramatisasi diberikan Greg Philo (Journalist Studies, 2002, 185) dalam kesimpulan artikelnya, *"This is in part the result of television coverage that tends to focus on dramatic, violent and tragic images while giving very little context or explanation to the events that are being portrayed."*

Dramatisasi pemberitaan tersebut mempunyai efek besar dan permanen. Kajian Soria Adam Matei dan Sandra Ball-Rokeach tentang hubungan konstruksi komunikatif media dengan memori rasa takut dalam kasus kerusakan Watts, Los Angeles, pada tahun 1965 menyimpulkan bahwa televisi mempunyai peranan sentral dalam menanamkan stigma kepada khalayak tentang suatu hal secara permanen. Dalam studi kasus mereka, televisi menjadi pembentuk stigma buruk dan menakutkan tentang 'Watts' dalam benak khalayak secara permanen, lebih dari empat dekade, karena dramatisasi yang dilakukan televisi (Matei dan Ball-Rokeach, Communication Monographs, 2005: 301-323).

Dalam konteks Indonesia, dramatisasi dalam pemberitaan bencana justru semakin menyeret mentalitas korban bencana menjadi pengemis di kampungnya sendiri, mentalitas pamer para pemberi sumbangan, dan mentalitas masyarakat luas untuk berbelas kasihan, bukan berempati pada korban.

Kritik atas berita-berita bencana juga bisa dilakukan dari sisi fase pemberitaan. Rahayu (*Polysemia*, Juli 2006) dan Yusuf (*Polysemia*, Juli 2006) mengkritik absennya peran media dalam masa prabencana sebagai bagian dari *early warning system*. Hal-hal yang menyangkut peringatan dini bencana, cara-cara menyelamatkan diri, justru beredar setelah bencana terjadi.

Berbagai kecenderungan dalam praktik jurnalisme bencana ini membuktikan kritik sinis sosiolog media, John Macmanus (1994) yang menuding bahwa media mengekspos berbagai peristiwa bencana secara sadar dan sistematis mengikuti logika komersial (*commodified*). Intinya, media menanggung untung besar dalam setiap bencana. Pertama, keuntungan dari meningkatnya oplah dan rating secara tajam karena pemberitaan gempa yang dilakukan. Kedua, keuntungan "kredibilitas" lembaga sebagai aktor sosial penting dalam pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana. Sekali lagi,

bagi media, bencana bukanlah *'bad news'*, melainkan *'good news'*, kisah sedih yang menghibur dan melipatgandakan keuntungan.

### Normatif Jurnalisme Bencana: Tahapan dan Prinsip Dasar

Satu yang pasti, rendahnya kualitas dan berbagai permasalahan dalam praktik jurnalisme bencana tersebut menunjukkan bahwa media-media di Indonesia belum mempunyai suatu kesepakatan kolektif tentang bagaimana memberitakan bencana (Masduki, *Jurnal UNISIA*, 2007). Dari berbagai literatur yang peneliti telusuri, media-media di Indonesia memang belum mempunyai panduan bagaimana memberitakan bencana. Kondisi ini adalah sebuah lubang besar karena Indonesia adalah negeri rawan bencana, berbagai bentuk bencana secara potensial terus mengancam. Seharusnya ada panduan untuk jurnalisme bencana, seperti halnya ada panduan jurnalisme di wilayah konflik dan perang (AJI dan Yayasan TIFA, 2003).

Maka, sebagai kajian pengantar, penulis mengajukan normatif jurnalisme bencana, meliputi fase-fase pemberitaan dan prinsip-prinsip dasar jurnalisme.

Fase-fase jurnalisme bencana yang peneliti temukan dari berbagai referensi secara terpisah-pisah (Yusuf, *Jurnal Komunikasi*, 2006: 45; Masduki, *Jurnal UNISIA*, 2007; Hight dan McMahon, 2006, [www.dartcentre.org](http://www.dartcentre.org)) dapat diramu dalam bagan berikut ini:

**Bagan 3**  
**Tahapan Normatif Pemberitaan Bencana**

Fase	Periode	Waktu	Topik Utama	Nara Sumber
Prabencana		Sepanjang waktu sebelum terjadi bencana.	Sepanjang waktu sebelum terjadi bencana.	Warga, Aparat, Ahli
Pada saat bencana	Darurat	Pada waktu terjadi bencana hingga satu hari sesudahnya.	Informasi dasar dan akurat tentang jenis dan sumber bencana, cara menyelamatkan	Ahli, Aparat
Paskabencana	Darurat	1-2 pekan paskabencana (bencana berskala kecil-menengah). 1-2 bulan paskabencana (bencana berskala besar).	Informasi kawasan bencana, cara memperoleh dan memberikan bantuan logistik, lokasi pengungsian, jumlah korban dan kerugian.	Warga, Aparat, Relawan
	Recovery	1-2 pekan setelah masa darurat (bencana berskala kecil-menengah). 1-2 bulan setelah masa darurat (bencana besar).	Informasi kondisi pengungsian secara lebih lengkap (penghuni, interaksi sosial, bantuan) <i>recovery</i> psikologis, gerakan penemuan keluarga, pendidikan darurat, kontrol bantuan bencana.	Warga, Aparat, Relawan, Ahli
	Rehabilitasi	1-2 pekan setelah masa <i>recovery</i> (bencana berskala kecil-menengah). 1-2 bulan setelah masa <i>recovery</i> (bencana berskala besar).	Kampanye bangkit, rehabilitasi sosial dan ekonomi, pembangunan kembali kerusakan fisik, distribusi bantuan rumah dan usaha produktif, kontrol bantuan bencana.	Warga, Aparat, Relawan, Ahli

Fase prabencana berlangsung sepanjang waktu. Muatan paling penting dalam kampanye berkelanjutan ini adalah pengingatan terus menerus bahwa masyarakat Indonesia hidup di negeri yang rawan bencana sehingga mereka selalu waspada, namun tetap tenang. Media harus menjadi bagian penting dalam *early warning system*. Selain itu, media harus berperan dalam kampanye hidup sehat dan peduli lingkungan, yang tentu saja akan meminimalisir bencana-bencana antropogen yang lebih disebabkan ulah manusia.

Saat terjadi bencana, media harus menyediakan informasi dasar yang akurat tentang jenis dan sumber bencana serta cara-cara menyelamatkan diri. Dalam fase ini, media harus menjadi aktor utama yang meminimalisir beredarnya rumor-rumor yang meresahkan masyarakat. Jelas, prinsip akurasi pemberitaan menjadi normatif-etis paling dasar yang harus dipegang teguh media dan para pekerjanya. Akurasi pemberitaan ini bisa dilakukan dengan tidak terburu-buru menyimpulkan dan menyiarkan apa yang tengah terjadi, sebaliknya melakukan cek dan ricek kepada berbagai sumber yang relevan dan kompeten hingga yakin betul dengan kebenaran informasi yang akan dipublikasikan.

Pada fase paskabencana, media harus menunjukkan komitmen kuat menuju rehabilitasi. Artinya, sejak memasuki fase ini — mulai dari tahap darurat, *recovery* dan rehabilitasi — media harus menanamkan visi mempercepat proses pemulihan psikologis, sosial dan ekonomi masyarakat yang tertimpa bencana. Segala kecenderungan pemberitaan yang tidak sejalan — atau bahkan kontraproduktif — dengan visi ini harus diminimalisir, misalnya kecenderungan pemberitaan yang mengeksploitasi kesedihan dan trauma para korban. Selain itu, media harus berupaya menjadi *watchdog* bagi distribusi bantuan bencana yang dilakukan berbagai pihak, bukannya justru menjadi distributor bantuan bencana itu sendiri.

Prinsip-prinsip dasar jurnalisme bencana penulis diperoleh dari sejumlah literatur secara terpisah-pisah (Yusuf, Jurnal Komunikasi, 2006: 47-49; Masduki, Jurnal UNISIA, 2007; Stepankowsky dan Seifert dalam Andersen dan Itule, 1984: 96-98; Hight dan McMahon, 2006, [www.dartcenter.org](http://www.dartcenter.org); Rahayu, Polysemia, Juli 2006; Amiruddin, Suara Merdeka, 26 Januari 2007). Temuan-temuan literatur tersebut selanjutnya penulis analisis dan klasifikasikan dalam beberapa kategori prinsip berikut ini:

### **1. Prinsip Akurasi**

- a. Tanggungjawab pertama dari media setelah terjadi bencana adalah memberikan informasi yang benar dan akurat tentang apa yang tengah terjadi. Media harus menjelaskan apakah rumor yang berkembang merupakan fakta atau bukan.
- b. Mengingat lingkup kejadian yang luas dan dampaknya yang besar, liputan bencana hendaknya dilakukan oleh tim peliput, bukan hanya satu orang.
- c. Dalam peliputan, media harus selalu mengecek dan mengecek ulang pada berbagai sumber informasi yang relevan, jangan hanya mengandalkan satu sumber informasi.

- d. Berbagai pakar yang dilibatkan dalam komentar mengenai bencana biasanya menganalisis berdasarkan prediksi dan skenario peristiwa apa yang akan terjadi. Dalam hal ini, media sebaiknya menjelaskan berbagai prediksi yang mungkin terjadi, lengkap dengan argumentasi, konteks, dan bagaimana menghadapinya.

## **2. Prinsip Humanis, Khususnya Prinsip Suara Korban**

- a. Media harus menyediakan ruang setara bagi semua pihak, terutama perempuan, anak-anak dan kaum *difabel*, untuk menyuarakan pendapat mereka. Prinsip humanis ini menuntut media meminimalisir pendapat dari para pejabat negara. Pernyataan dari pejabat hanya diberitakan dalam konteks yang memang "harus", misalnya pernyataan-pernyataan resmi tentang bencana atau pernyataan tentang bantuan dari negara.
- b. Media harus menghormati peraturan mengenai akses media yang dibuat oleh rumah sakit atau institusi medis lainnya.
- c. Pers tidak boleh menambah penderitaan orang yang sedang dalam kondisi gawat darurat, orang yang sedang berduka, dengan cara memaksa untuk diwawancarai. Termasuk dalam hal ini, gambar korban yang sedang menderita hanya dibolehkan dalam konteks yang mendukung tayangan. Pelanggaran etis yang begitu kentara atas prinsip ini dilakukan sebuah stasiun televisi swasta Indonesia yang tanpa rasa empati sedikitpun mewawancarai korban tabrakan KA Sembrani dan KA Kertajaya di dekat Stasiun Gubuk, Purwodadi, yang tengah merengas nyawa.
- d. Media harus menghormati mitologi yang berkembang di masyarakat tentang bencana yang terjadi. Seringkali, mitologi ini bertentangan penjelasan ilmiah dari para ahli. Media tidak selayaknya mem-*blow up* perbedaan keyakinan ini secara berlebihan sebagai sebuah pertentangan. Penjelasan objektif-ilmiah atas bencana yang terjadi sebaiknya disandingkan dengan reportase subjektif-fenomenologis yang berusaha memahami apa adanya (*verstehen*) alam pikir masyarakat yang mempercayai mitologi tersebut.

## **3. Prinsip Komitmen Menuju Rehabilitasi**

- a. Paskabencana, tugas utama media adalah mempercepat proses pemulihan psikologis, sosial dan ekonomi masyarakat yang tertimpa bencana. Segala kecenderungan pemberitaan yang tidak sejalan — atau bahkan kontraproduktif — dengan visi ini harus diminimalisir, termasuk kecenderungan umum pemberitaan yang dramatis dan traumatis. Termasuk dalam prinsip ini, peliputan korban harus dilakukan dengan mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya.
- b. Media harus menginisiasi masyarakat melupakan masa lalu yang kritis dan menyeramkan, bangkit dan menatap ke depan dengan menyuguhkan menyuguhkan berbagai solusi praktis yang secepatnya bisa dilakukan. Dalam

hal ini, media perlu melibatkan akademisi ahli yang berhubungan dengan penanganan pascabencana, seperti psikolog dan dokter, untuk berkomentar lewat media ataupun bekerjasama mengadakan program-program rehabilitasi pascabencana.

- c. Media harus mampu menjadi wadah bagi proses penemuan kembali antar anggota keluarga yang terpisah (*lost and found*).

#### **4. Prinsip Kontrol dan Advokasi**

- a. Media seharusnya melakukan pemberitaan bencana secara konsisten dan terus menerus sepanjang masalah-masalah krusial yang ditimbulkan bencana tersebut —misalnya masalah distribusi bantuan — belum selesai. Berangkat dari pendekatan oplah dan rating, normatif-etis pertama ini menjadi sangat susah dilakukan, namun setidaknya media masih menyediakan kolom dan waktu siar yang proporsional bagi perkembangan permasalahan bencana tersebut dalam rentang waktu lebih panjang.
- b. Seperti telah penulis paparkan secara mendalam, dalam fase pascabencana, media harus menjalankan fungsi pengawasan (*surveillance*) dengan menjadi *watchdog* bagi pihak-pihak penyalur bantuan bencana. Dalam praktiknya, prinsip etis ini tidak mudah dijalankan, karenanya media harus mempunyai strategi-strategi khusus. Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah, pertama, menerapkan model *investigative journalism*. Kedua, jika *investigative journalism* terlalu sulit dilaksanakan karena berbagai sebab, media harus membangun jaringan atau aliansi bersama antara media, LSM, dan akademisi untuk mengontrol penyaluran bantuan bencana ini.
- c. Prinsip kontrol terpenting lainnya adalah media harus berperan penting dalam *early warning system* bencana.

#### **Penutup**

Berbagai kelemahan dalam praktik jurnalisme bencana telah penulis jelaskan meninggalkan sebuah pertanyaan penting: faktor-faktor apakah yang menyebabkan rendahnya kualitas jurnalisme bencana?

Setidaknya terdapat dua faktor yang 'mungkin'. *Pertama*, masih rendahnya ketrampilan jurnalistik wartawan-wartawan Indonesia, terutama ketika meliput bencana. *Kedua*, faktor yang lebih mendasar, ideologi kapital-komersial yang telah mengakar dalam setiap aktifitas media dan jurnalistik, menjadi ideologi dominan para pengelola media, termasuk pekerjanya.

Terkait dua kemungkinan tersebut, sebagai penutup artikel, penulis mengajukan beberapa agenda. *Pertama*, penelitian komprehensif dan mendalam tentang praktik jurnalisme bencana di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis isi atas berita-berita bencana, tapi lebih jauh berusaha mengungkap praktik produksinya.

Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) dengan tiga level analisis yang lengkap menjadi sebuah pilihan metodis yang tepat. Level pertama, analisis teks berita-berita bencana secara kritis. Kedua, analisis kognisi sosial dan relasi kuasa dalam proses produksi berita-berita bencana, melalui wawancara mendalam dengan para wartawan dan pengelola media yang terlibat dalam produksi berita bencana. Ketiga, analisis diskursus bencana yang beredar di masyarakat, dengan penelusuran literatur dan wawancara mendalam dengan pakar-pakar terkait (Teun A. van Dick, 2001).

*Kedua*, pengadaan panduan dan kode etik jurnalisme bencana. Rendahnya peran informatif media dalam bencana adalah konsekuensi logis ketiadaan kesepakatan kolektif tentang bagaimana memberitakan bencana (Masduki, UNISIA, 2007). Saat ini, pedoman yang ada hanyalah prinsip-prinsip atau tips-tips singkat meliput di wilayah bencana, tersebar dan terpisah-pisah di berbagai literatur, yang bisa jadi tidak populer di kalangan para jurnalis.

Seperti dalam penyusunan KEWI atau Kode Etik Jurnalistik, peran Dewan Pers dan asosiasi-asosiasi jurnalis sangat vital dalam proses penyusunan panduan dan kode etik jurnalisme bencana ini. Sinergis dengan agenda pertama, hasil-hasil penelitian dari para akademisi tentang jurnalisme bencana dapat menjadi masukan penting bagi penyusunan panduan dan kode etik jurnalisme bencana ini.

*Ketiga*, pelatihan jurnalisme bencana bagi wartawan Indonesia secara berkelanjutan. Asumsinya, rendahnya kualitas jurnalisme bencana lebih disebabkan faktor ketrampilan para jurnalis yang masih rendah. Namun, jika ternyata faktor penyebabnya adalah ideologi kapital-komersial wartawan dan pengelola media, keberadaan panduan dan kode etik jurnalisme bencana akan menjadi batasan 'etis' yang sangat penting, tentunya dengan komitmen tinggi untuk melaksanakannya.

### Daftar Pustaka

- Aceh Recovery Forum. 2005. "Laporan Evaluasi Kelompok Kerja VIII: Komunikasi, Informasi dan Hubungan Kelembagaan".
- Amirudin. 2006. "Pendekatan Jurnalisme Bencana". *Suara Merdeka*, Rabu, 26 April 2006.
- \_\_\_\_\_. 2007. "Media dalam Liputan Bencana". *Suara Merdeka*, 26 Januari 2007.
- Andersen, Douglas A. dan Bruce D. Itule. 1984. *Contemporary News Reporting*. New York: Random House.
- Dadan, Sulyana. 2006. "Rekonstruksi Sosiologis Korban Gempa". *Kompas*, Sabtu, 30 September 2006.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hermawan, Anang. 2007. "Agenda Baru Jurnalisme (Bencana)". *Bernas Jogja*, 22 Februari 2007.
- Hight, Joe dan Cait McMahon. 2006. "Meliput Trauma: Panduan Dart Centre untuk Para Wartawan, Redaktur dan Manajer". [www.dartcentre.org](http://www.dartcentre.org).

- Masduki. 2007. "Wajah Ganda Media Massa dalam Advokasi Bencana Alam". *Jurnal UNISIA*, No. 63/XXX/V/2007, Januari Maret 2007.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press.
- Matei, Sorin Adam dan Sandra Ball-Rokeach. 2005. "Watts, the 1965 Los Angeles Riots, and the Communicative Construction of the Fear Epicenter of Los Angeles". *Communication Monographs*, Vol. 72, No. 3, September 2005.
- McQuail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Terj. Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Narendra, Pitra. 2006. "Media dan Pemberitaan Bencana: Menemukan Kembali Identitas Nasional". *Polysemia*, Edisi 3, Juli 2006.
- Nurchayyo, Henri. "Tuhankah yang Salah?". <http://www.mediacenter.or.id/editorial>.  
"Pengelolaan Bencana: Pengelolaan Kerentanan Masyarakat." [www.walhi.or.id/kampanye/bencana](http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana).
- Philo, Greg. 2002. "Television News and Audiences Understanding of War, Conflict and Disaster". *Journalism Studies*, Volume 3, Number 2, 2002.
- Putra, I Gusti Ngurah. 2006. "Media dan Agenda-agenda Pemberdayaan Pasca Bencana: Memaksimalkan Fungsi *Watchdog*". Makalah disampaikan dalam Seminar Media, Solidaritas Sosial dan Proses Rekonstruksi Pascabencana, di Ruang Seminar FISIPOL UGM, 9 Agustus 2006.
- Rahayu. 2006. "Refleksi: Fungsi Media di Negara Rawan Bencana". *Polysemia*, Edisi 3, Juli 2006.
- \_\_\_\_\_. 2006. "Kita, Radio dan Bencana". *Polysemia*, Edisi 3, Juli 2006.
- "Sejuta Bencana Terencana di Indonesia." [www.walhi.or.id/kampanye/bencana](http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana).
- Tim Reporter Without Borders. 2003. *Panduan Praktis untuk Jurnalis di Wilayah Konflik*. Jakarta: AJI dan Yayasan TIFA.
- Van Dick, Teun A. 1991. "The Interdisciplinary Study of News as Discourse". Dalam Klaus Bruhn Jensen dan Nicholas W. Jankowski (ed.). *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*. London and New York: Routledge.
- Yusuf, Iwan Awaluddin. 2006. "Ada Kuis di Tengah Gempa: Membangun Epistemologi Liputan Bencana di Media". *Jurnal Komunikasi*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2006.
- \_\_\_\_\_. 2006. "Menyoal Liputan Bencana di Televisi". *Polysemia*, Edisi 3, Juli 2006.

